BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu–individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Istilah kebijakan publik diartikan berbeda–beda oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Robert Eyestone (Budi Winarno, 2012:20). Eyestone menyatakan secara luas kebijakan publik didefinisikan sebagai "hubungan atuan unit pemerintah dengan lingkungan". Pendapat ini dianggap sangat luas cakupannya karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik menyangkut banyak hal, sehingga sulit untuk dimengerti karena banyak sekali kaitannya. Sementara itu, Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa "Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan an tidak dilakukan". Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak

tepat, namun batasan ini dianggap cukup memberi perbedaan yang jelas apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Richard Rose memberi definisi tentang kebijakan publik "serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi–konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri". Definisi Richard Rose masih dianggap ambigu. Sedangkan Anderson (dalam Budi Winarno, 2012:21) kebijakan publik adalah:

> Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memuatkan perhatian pada yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Dari penjelasan mengenai kebijakan publik oleh para ahli di atas dapat diartikan secara singkat yaitu suatu keputusan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat yang menyangkut banyak kepentingan, sehingga keputusan yang diambil harus bijak dan tepat. Harus bijak dan tepat maksudnya harus sesuai tidak direkayasa, karena ini menyangkut masalah masyarakat.

b. Pelaksana/Implementor Kebijakan Publik

Keberhasilan kebijakan publik bukan karena isinya saja yang membuat berhasil diterapkan, peran para pelaksana atau implementor

kebijakan publik juga sangat berpengaruh. Pelaksana atau implementor kebijakan publik (Budi Winarno, 2012:221-224) antara lain:

1) Birokrasi

   Badan-badan birokrasi mempunyai keleluasaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang berada dalam yuridiksinya karena mereka dalam bekerja sering berdasarkan mandat perundang-undangan yang ada dan luas namun masih ambigu. Keadaan ini terjadi karena para birokrat yang berperan serta dalam proses legislasi seringkali kurang mampu atau tidak mau untuk membuat pedoman yang tepat.

2) Lembaga Legislatif

   Asumsi dalam banyak literatur administrasi publik menyatakan bahwa politik dan admisistrasi adalah kegiatan yang terpisah. Politik berkaitan erat dengan perumusan kebijakan, yang harus ditangani oleh cabang-cabang "politik" dari pemerintah, dalam arti cabang eksekutif dan cabang legislatif. Tata kelola kebijakan, disisi lain, berkaitan dengan implementasi keputusan yang dianut oleh banyak cabang politik dan ditangani oleh badan administratif. Sekarang asumsi ini dipersoalkan, karena cabang-cabang administratif sering terlibat langsung dalam implementasi kebijakan publik.

3) Lembaga Peradilan

   Dalam kasus undang-undang publik, sistem politik modern diberlakukan oleh tindakan yudisial. Lembaga peradilan dapat terlibat

langsung untuk tata kelola sebuah kebijakan, Seperti tindakan naturalisasi bagi warga negara asing yang sebenarnya bentuk kegiatan administrasi dan mengatur masalah aborsi. Walaupun demikian, yang terpenting dari keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata adminisrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan administrasi dan regulasi, dan pengkaitan ulang terhadap keputusan-keputusan administrasi dalam kasus-kasus dibawa ke peradilan.

4) Kelompok-kelompok Penekanan

Berdasarkan diskresi yang berlaku dalam banyak badan administrasi, sebuah kelompok yang mampu mempengaruhi tindakan dari badan administrasi akan memungkinkan timbul efek yang substansial pada arah dan dampak dari kebijakan publik. Biasa terjadi jika hubungan antara suatu kelompok kepentingan dengan suatu badan administrasi bisa terjalin dekat, sehingga timbul asumsi bahwa suatu kelompok kepentingan telah “menguasai” badan administrasi.

5) Organisasi-organisasi Masyarakat

Pada tingkat lokal, organisasi-organisasi masyarakat sering terlibat dalam implementasi program-program publik di lapangan. Pada dasarnya organisasi yang terlibat adalah organisasi yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Organisasi-organisasi tersebut dapat berperan dalam hal pengawasan dan auditnya. Sehingga nanti bisa

meninimalisir penyelewengan terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan.

Dari penjelasaan di atas, maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik masing-masing implementor harus saling berkoordinasi, supaya terjalin komunikasi yang akan mempermudah implementasi kebijakan dan bisa meminimalisir terjadinya kesalahan. Kebijakan publik di laksanakan oleh implementor seperti di atas, seperti halnya program pendidikan nonformal yang mempunyai implementor untuk melaksanakannya. Pendidikan nonformal merupakan bentuk kebijakan pendidikan yang termasuk dalam kebijakan publik.

2. Kebijakan Pendidikan

a. Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia Wikipedia (dalam Riant Nugroho, 2008:35-36) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalam tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Selengkapnya disebutkan demikian:

> *Education policy refers to the collection of laws or rules that govern the operation of education systems. It seeks to answer questions about the purpose of education, the objectives(societal and personal) that it is designed to attain, the methods for attaining them and the tools for measuring their success or failure.*

Mark olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Niel (dalam Riant Nugroho, 2008:36) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan

merupakan kunci utama, bahkan sangat penting bagi semua negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan harus mendapatkan prioritas utama. Salah satu argumen utamanya adalah globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberi hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Dikatakan sebagai berikut:

> *....education policy in the twenty-first century is the key to global security,sustainability and survival...education policies are central to such global mission...a deep and robust democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state is necessary to sustain democracy at the national level to that strong democratic national-state can buttress forms of international governance and ensure that globalization become of force for global sustainability and survival...*

Margaret E. Goertz (dalam Riant Nugroho, 2008:37) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting karena dengan adanya biaya pendidikan yang mahal. Dikatakan sebagai berikut: "*...An increased emphasis on educational adequacy and the public's concern over the high cost of education is focusing policy makers' attention on the afficiency and effectiveness of education spending...*"

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, peneliti memahami kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Maka kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik.

b. Kebijakan Pendidikan Nonformal

Salah satu kebijakan pendidikan yang populer adalah kebijakan pendidikan nonformal. Di Indonesia kebijakan pendidikan nonformal dapat ditelusuri melalui undang-undang (dalam Alifudin, 2011:45-68) sebagai berikut:

1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pada pasal 26 ayat 1 UU SISDIKNAS yang berbunyi "pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat" .

Sedangkan pada pasal 26 ayat 2 berbunyi "Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional".

Dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal ada bermacam-macam jenis seperti yang dijelaskan pada pasal 26 ayat 3 berbunyi "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".

Hasil pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan pendidikan formal setelah disetarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional.

2) Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 mengatur tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal. Isi peraturan ini menjelaskan tentang tujuan pendidikan nonformal meliputi: 1) menggambarkan pencapaian tingkat mutu yang seharusnya dicapai dalam program pembelajaran; 2) mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional secara relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat; 3) diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikan masukan dengan berbagai pihak; 4) disosialisasikan pada sejumlah pihak yang berkepentingan.

Dalam Permendiknas nomor 49 tahun 2007 dibahas mengenai perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan pendidikan nonformal, dan sistem informasi manajemen.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah antara lain dijabarkan beberapa point

penting. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah baik lembaga maupun tidak.

Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai oleh pendidikan luar sekolah antara lain: *pertama*, melayani masyarakat untuk belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin serta sepanjang hidupnya, guna meningkatkan martabat dan kualitas hidupnya. *Kedua*, memberi bimbingan masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap mental yang sangat diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pendidikan di sekolah.

Persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah ditetapkan oleh menteri atau menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen setelah berkonsultasi dengan menteri. Penyelenggara pendidikan luar sekolah terdiri atas pemerintah, badan, kelompok atau perseorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan luar sekolah tersebut.

Dalam peraturan pemerintah ini juga dijelaskan mengenai tenaga pengajar pendidikan luar sekolah, kurikulum pendidikan luar sekolah, jenis-jenis pendidikan luar sekolah. Dalam penilaian hasil belajar

pendidikan luar sekolah dengan dinyatakan dengan surat keterangan lulus, ijazah atau sertifikat.

4) Rencana Strategis Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah 2005-2009

Renstra Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah (Renstra Ditjen) 2005-2009 antara lain dinyatakan bahwa program kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH); yang harus dicapai adalah target membelajarkan penduduk dewasa yang menganggur, miskin, atau/tidak terampil sebanyak 1,5 juta orang. Dalam upaya mencapai target tersebut program dan/atau kegiatan pendidikan nonformal yang memiliki kriteria SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound)* dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kinerja pendidikan nonformal.

Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk pemantauan dan evaluasi serta pengukuran kinerja organisasi. Antara lain: Indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran dan indikator dampak.

Dari berbagai kebijakan pendidikan yang ada diatas diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tetapi belum didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai operasionalnya. Namun, keberadaan dasar pendidikan nonformal sudah cukup kuat untuk membekali masyarakat akan pendidikan yang berguna bagi keberlangsungan hidupnya dan berguna bagi bangsa dan negaranya.

3. Implementasi Kebijakan

a. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementsai kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang–undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan–tujuan kebijakan dan program–program.

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2012:148) mengungkapkan bahwa implementasi memiliki arti apa yang telah terjadi setelah undang–undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan–tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan. Implementasi mencakup tindakan–tindakan (tanpa tindakan–tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Grindle berpendapat (dalam Budi Winarno, 2012:149) yang memberikan pengertian berbeda terkait dengan implementasi, yaitu :

> Tugas implementasi membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan–tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi adalah mencapai terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana–sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan–tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, para ahli juga memeparkan pendapatnya, antara lain:

1) Model George C Edwards III

Model implemantasi kebijakan ini berperspektif *top down*. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

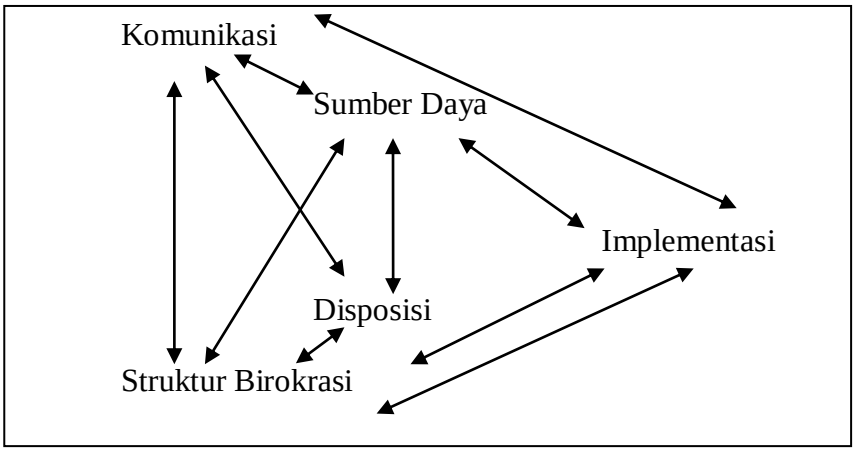

Gambar 1. Faktor penentu implementasi menurut Edward III

Sumber: Edward III (dalam Subarsono, 2011:91)

a) Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur

keberhasilan variable komunikasi antara lain (dalam Agustino, 2006:150-151):

(i) *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.

(ii) *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaa kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.

(iii) *Konsistensi*, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

b) Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Dispoisisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 152-153) antara lain:

(i) Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

(ii) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

d) Strukur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:

(i) Standard Operational Procedures (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetepkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

(ii) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

2) Sementara itu keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni:

a) Isi kebijakan *(content of policy)*, yang mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadahi.

b) Lingkungan implementasi *(context of implementation)*, mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan,kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1) Isi kebijakan *(content of policy)*, yang mencakup:

   a) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.

   b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak

jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.

c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.

d) Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.

e) Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.

f) Dukungan dari sumber daya yang memadahi. Sumber daya manusia (implementor) harus memadahi dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain

itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.

2) Lingkungan implementasi *(context of implementation)*, mencakup:

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.

b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.

c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga

mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

Dari teori George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. Edward III untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model George C. Edwards III , teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.

4. Pendidikan

Pendidikan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Pengertian pendidikan sendiri sangat bermacam–macam dan dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya George F. Kneller (dalam Siswoyo 2011) dalam bukunya yang berjudul *Foundations of Education*, pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Pendidikan dalam arti luas menunjukkan suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa (*mind)*, watak (*character*), atau kemampuan fisik (*physical ability*) individu. Pendidikan dalam arti ini berlangsung terus seumur hidup. Pendidikan dalam arti teknis adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga–lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga–lembaga lain), dengan sengaja

mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan–keterampilan, dari generasi ke generasi.

Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut:

> Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi didirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keteramapilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun unsur yang esensial yang tercakup dalam pengertian pendidikan dalam Siswoyo (2011: 55-56) adalah sebagai berikut:

a. Dalam pendidikan terkandung pembinaan (pembinaan keperibadian), pengembangan (pengembangan kemampuan–kemampuan atau potensi–potensi yang perlu dikembangkan) peningkatan (misalnya yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu tentang dirinya menjadi tahu tentang dirinya) serta tujuan (kearah mana peserta didik akan diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin).
b. Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua pihak, yaitu pihak pendidik dan pihak peserta didik yang dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peran semua pihak, akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu saling mempengaruhi, guna terlaksana proses pendidikan (transformasi pengetahuan, nilai nilai dan keterampilan-keterampilan) yang tertuju pada tujuan–tujuan yang diinginkan.
c. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan upaya perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi

dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu sebagai makhluk sosial dan sebagai mahkluk Tuhan.

d. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah dan di dalam masyarakat.

Kebijakan pendidikan di Indonesia didasari pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Sistem pendidikan diartikan sebagai seluruh komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan dilaksanakan melalui jalur–jalur pendidikan yang telah ditentukan undang–undang. Ada tiga jalur pendidikan dalam SISDIKNAS, yaitu jalur pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstuktur berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, atas dan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

a. Pengertian Pendidikan NonFormal

Pendidikan nonformal pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) tahun 2003 disebut sebagai pendidikan luar sekolah (PLS), kemudian pada UU SISDIKNAS yang baru (UU No.20 tahun 2003) disebut sebagai pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal disebutkan sebagai bagian dari pendidikan nasional secara menyeluruh. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang

diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal lebih terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat. Program pendidikan nonformal dapat merupakan lanjutan atau pengayaan dari berbagai program sekolah, pengembangan diri dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah.

Pendidikan nonformal mempunyai keleluasaan jauh lebih besar daripada pendidikan sekolah yang secara cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah. Pendidikan nonformal dapat menangani kegiatan pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal merupakan jembatan antara pendidikan sekolah dan dunia kerja. Dengan demkian, pendidikan nonformal sebagai penambah, pelengkap dan pengganti pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang Soepardjo Adikusumo (dalam Oong komar:2006:214) :

> Setiap kesempatan yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhannya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisiensi dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Jalur pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah umum melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, baik yang di

lembagakan maupun tidak. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan nonformal mengacu pada tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Selain itu pengertian pendidikan nonformal yang mengacu pada proses penyelenggaraan kegiatannya ataupun memperbandingkan dengan satuan pendidikan yang lain.

Tujuan pokok dari Pendidikan Nonformal sesuai dengan UU No 20 tahun 2003, dan perangkat peraturannya yang telah terbit, merupakan landasan yang mengatur penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara nasional dengan memberikan ketetapan, kepastian dan jaminan secara hukum. Salah satu hal yang digariskan: bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dengan demikian, Sistem Pendidikan Nasional sekaligus alat dan tujuan untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasonal. Pendidikan nonformal memiliki peranan serta kedudukan yang sama atau sejajar tingkatannya dengan pendidikan sekolah dalam melaksanakan fungsi pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

b. Program Pendidikan Nonformal

Banyak program dalam menunjang terciptanya pendidikan nonformal, yang terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pedidikan berkelanjutan. Menurut D. Sudjana (dalam Komar, 2006:235): “diklasifikasikan (program–programnya) oleh para ahli menurut “kacamata” keahlian masing–masing”. Maka dari itu secara

konseptual, program pendidikan nonformal sangat bervariasi dan dengan rentang yang luas. Di bawah ini akan dikemukakan pendapat para ahli mengenai pengklasifikasian program pendidikan nonformal.

Berdasarkan tujuannya, Harbinson (dalam Komar, 2006:235) membagi program pada tiga katagori, yaitu : (a) dengan menyiapkan angkatan kerja untuk generasi yang siap masuk dalam dunia kerja, (b) dengan meningkatkan kemampuan kerja bagi para pekerja, (c) memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dunia kerja luas.

Hoxeng dan Srinivasan pendapat (dalam Komar, 2006:235) yang mengklasifikasikan program atas dasar pendekatan pembelajaran yang digunakan, yakni: pembelajaran dalam pendididikan nonformal dapat berupa pembelajaran yang memusatkan pada bahan belajar (*content centered*), selain itu pembelajaran juga pada pemecahan masalah (*problem focused*), yang diharapkan agar mampu memecahkan masalah yang ada, perubahan di dalam masyarakat juga mempengaruhi pendidikan nonformal, sehingga sangat penting bagi siswa untuk mempelajari pembelajaran yang memusatkan pada perubahan masyarakat (*consciantization*), kemampuan yang dimiliki oleh siswa juga akan diasah melalui metode pembelajaran yang berbasis pada kreativitas dan pengembangan sumber daya manusia (*human development an creative planning*).

Moro'oko (dalam Komar:2006-236) menggolongkan program berdasarkan kegiatan yang dilakukan, yaitu :

belajar mandiri dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh, belajar dari sumber lingkungan yang tersedia, belajar melalui latihan hubungan kemanusiaan, belajar secara volunter, belajar melalui kegiatan kemasyarakatan.

Husen dan Postlethwaite (dalam Komar:2006-236), berdasarkan relevansi dengan pembangunan, membagi program pada tiga kategori : (a) pendidikan dalam Pendidikan Non Formal harus sesuai dengan pembangunan pertanian, jasa dan industri, karena akan membantu pembangunan, (b) politik tidak akan terlepas dari masyarakat sehingga perlu adanya pembelajaran politik salah satunya pendidikan harus relevan dengan pembinaan kesadaran politik, (c) pendidikan yang relevan dengan pengembangan nilai sosial budaya.

Uraian di atas adalah program pendidikan nonformal yang telah diklasifikasikan oleh para ahli, yang tujuannnya untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah menerapkan program–program tersebut dalam kehidupan.

c. Terobosan Pendidikan Nonformal

Uraian tentang pendidikan nonformal telah banyak, yang memfokuskan pada aspek pengorganisasian, kelembagaan yang menaunginya, pembiayaan, lamanya penyelenggaraan, program terkait dengan lembaga lain, dan belajar mengajar dalam sistem pendidikan nonformal. Oong Komar (243-244) mengemukakan, ada lima terobosan yang bisa dimainkan oleh pendidikan nonformal guna memecahkan masalah mendesak yang dialami manusia dari sudut pandang pendidikan, yaitu:

1) Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dari sudut pandang pendidikan yaitu dengan cara/teknik menjadikan pendidikan nonformal sebagai pendidikan alternatif yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku produktif sikap wiraswasta. Dimana pendidikan nonformal mampu menyerap masyarakat di segala usia dan segala strata sosial untuk ikut kegiatan pendidikan nonformal, kebanyakan kegiatan pendidikan nonformal lebih berbentuk praktek sehingga nantinya bisa siap kerja dan mampu berkarya di dunia usaha.

2) Masalah Pengangguran

Banyak penyebab pengangguran yang terjadi di masyarakat, maka pemecahan masalah pengangguran perlu diketahui latar belakangnya. Hal ini untuk membantu memberi dan menciptakan solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut. Antara lain disebabkan oleh perubahan struktur industri, ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki, ketidakcocokan letak geografis, pergeseran masalah penduduk, kekuatan institusi, tidak bisa bekerja dan rekontruksiasi kapital. Latar belakang pengangguran di atas sangat berhubungan dengan masalah pendidikan, baik yang disebabkan kelembagaan penyesuaian program pendidikan, maupun penyesuaian keterampilan kerja.

3) Masalah Penduduk Usia Sekolah

Sebenarnya masalah ini menyangkut masalah pendidikan formal yang tidak mampu menampung calon siswa yang ingin mengenyam pendidikan karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan biaya, keterbatasan jumlah sekolah. Maka, perlu pendidikan pengganti pendidikan formal untuk menampung siswa yang tidak tertampung di pendidikan formal. Pendidikan nonformal menjadi solusi karena mampu menghasilkan kesetaraan pendidikan formal yang ada di sekolah–sekolah.

4) Masalah Siswa Putus Sekolah

Banyaknya masalah sosial yang ada di masyarakat mengakibatkan pemenuhan akan pendidikan terabaikan karena masyarakat mementingkan kepentingan yang lain sehingga menyebabkan angka putus sekolah masih ada. Penyebab lama yang selalu menjadi alasan utama putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, budaya, dan lain–lain. Alasan tersebut dapat ditanggulangi, tetapi penyebab baru muncul, dalam bentuk yang menyangkut kendala terobosan sekolah siswa atau berkaitan sektor lain (pabrik/industri) yang daya tariknya lebih kuat daripada sektor pendidikan (sekolah). Akhirnya masalah putus sekolah tidak usai, pendidikan nonformal mampu memberikan solusi dengan mengasah kreativitas mereka melalui keterampilan dan bidang lainnya.

5) Peluang Pengembangan Pribadi

Pendidikan nonformal bisa menjadi wahana untuk mengisi waktu senggang masyarakat, baik dalam rangka meningkatkan keterampilan dan penyuluhan hobi, maupun memperindah citra diri dan kepribadian.

Terobosan-terobosan pendidikan nonformal tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang banyak membelenggu masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Pendidikan nonformal juga tidak memfokuskan pada masalah-masalah tersebut namun juga masalah pendidikan yang menyangkut keterampilan yang tidak didapat di pendidikan formal sebelumnya.

e. Input pendidikan Nonformal

Sistem pendidikan nonformal salah satu komponennya adalah *input* atau masukan. *Input* atau masukan adalah segala sesuatu yang harus tersedia dan dibutuhkan untuk berlangsungnya proses (Depdiknas, 2001). *Input* dalam pendidikan nonformal adalah modal awal untuk terjadinya aktivitas pendidikan nonformal. Dalam pendidikan nonformal ada beberapa *input* atau masukan antara lain:

1) *Pertama*, masukan lingkungan (*enviromental input*) yang terdiri atas lingkungan yang mendukung berjalannya pendidikan nonformal. Dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lapangan kerja, kelompok sosial yang mencakup sumber daya alam,

termasuk juga lingkungan daerah, lingkungan nasional dan lingkungan internasional. Lingkungan daerah mencakup kebijakan dan perkembangan pendidikan, sosial ekonomi dan budaya, lapangan kerja dan usaha, dan potensi alam skala lokal. Lingkungan nasional mencakup peraturan, kebijakan pendidikan skala nasional yang mencakup pendidikan nonformal. Sedangkan lingkungan internasional mencakup hubungan antara negara, ekonomi, teknologi dan kecenderungan yang terjadi di tingkat dunia pada masa yang akan datang.

2) *Kedua*, masukan sarana (*instrumental input*) adalah keseluruhan sumber yang menunjang seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan belajar. Komponen-komponen yang dimaksud antara lain tempat belajar, fasilitas belajar, kurikulum belajar, tenaga pengajar.

3) *Ketiga*, masukan mentah (*raw input)*, dalam sistem pendidikan nonformal masukan mentah berupa warga negara yang belajar dengan berbagai karakter yang dimiliki baik internal maupun eksternal. Karakteristik internal adalah karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang ada dalam dirinya yang berupa atribut fisik, psikis dan fungsional. Sedangkan karakteritik eksternal yang berasal dari luar individu, berasal dari lingkungan. Karakteristik eksternal berkaitan dengan keadaan di lingkungan peserta didik yang berupa lingkungan keluarga, masyarakat atau kelompok.

4) *Keempat*, masukan lain adalah dorongan yang memungkinan peserta didik ataupun lulusan pendidikan nonformal mampu menggunakan kemampuannya untuk memajukan hidupnya. Masukan ini dapat berupa sumber dana atau modal, alat produksi, proses produksi, bahan baku, lembaga pemasaran dll.

Masukan-masukan (*input*) akan diproses ke dalam lembaga pendidikan nonformal untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Kualitas dan kuantitas dapat mempengaruhi pendidikan yang telah dilakukan. Input yang baik belum tentu hasilnya akan baik. Kualitas pendidikan ditentukan oleh proses yang terjadi dalam pendidikan.

B. Penelitian yang Relevan

1. Heru Eko Prasetyo (2005) dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Nonformal (studi kasus sanggar kegiatan belajar Sewon, Bantul)". Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

   Penelitian ini menggunakan jenisnya kualitatif, dengan menggunakan positivisme phenomenologik–interpretif paradigma naturalistik. Pendekatan ini mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal dan budi untuk melakukan dan menjelaskan serta berargumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi dari Sherry Arnsiein dengan tangga partisipasinya dikomparasikan dengan bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Bruce Mithcell

dengan dukungan strategi kerjasama dari *Ontario Ministry of Natural Resorces.*

Pada penelitian ini, peneliti menguraikan pembahasan pada tiga pokok mengenai partisispasi dalam organisasi sanggar kegiatan belajar, partisipasi dalam sosialisasi pendidikan nonformal dan partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan. Secara garis besar masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan nonformal di sanggar kegiatan belajar Sewon Bantul dibagi menjadi dua yaitu masyarakat sebagai warga belajar dan masyarakat di luar warga belajar. Partisipasi masyarakat dalam proses atau tahapan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar Sewon memunculkan pola-pola partisipasi yang beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan tahapan yang dilalui.

2. Aan Hardiyudha (2011) dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Nonformal (Stusi Kasus di PKBM Suka Caturtunggal Depok Sleman)". Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

   Partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal merupakan suatu bentuk peranan masyarakat yang bersifat holistik pada penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan. Dalam studi kasus di PKBM Suka Caturtunggal Depok Sleman, masyarakat Desa Caturtunggal Kabupaten Sleman

memainkan peran sebagai penggagas, pengelola, tutor dan warga belajar.

Fenomena ini merupakan suatu hal yang layak dijadikan sebagai objek penelitian karena partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal di PKBM Suka Caturtunggal Depok Sleman membuktikan bahwa masyarakat Desa Caturtunggal Depok Sleman telah mampu berperan aktif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan nonformal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud dan level partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal di PKBM Suka Caturtunggal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga peristiwa-peristiwa yang bersifat mikro dapat terekam dan dapat menghasilkan gambaran holistik terhadap fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Level partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal di PKBM Suka Caturtunggal berada pada tangga *Citizen Control*. Dalam program pendidikan nonformal di PKBM Suka Caturtunggal, masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur program-program pendidikan nonformal serta mengatur kelembagaan penyelenggara program pendidikan nonformal. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu dipertahankannya model partisipasi masyarakat

yang melibatkan tutor, pengelola, warga belajar dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PKBM Suka Caturtunggal.

C. Kerangka Pikir

Pendidikan nonformal adalah salah satu bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih banyaknya anak-anak di Indonesia yang belum memperoleh pendidikan formal, sehingga pendidikan nonformal dapat menjadi solusinya. Salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas II A Kutoarjo. Narapidana anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal di sekolah umum, diharapkan mampu menyetarakan, meningkatkan, mengembangkan dan mengelola kemampuan mereka melalui pendidikan nonformal.

Untuk mempermudah pembelajaran penyetaraan dalam Lapas Anak dibangun sebuah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) “Tunas Mekar” yang berdiri sejak 2010. Sebelumnya untuk kegiatan belajar ini Lapas menumpang dengan PKBM “Sawunggalih”, karena terkendala tempat dan tata tertib maka Lapas dan pengelola PKBM “Tunas Mekar” mendirikan PKBM sendiri yang berada didalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, pendidikan nonformal menjadi program utama yang terdiri dari program bimbingan belajar, kursus, dan olahraga. Sasaran implementasi pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas IIA

Kutoarjo adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kepada narapidana yang masih anak-anak, bukan sekedar bimbingan belajar yang diberikan tetapi keterampilan juga diberikan untuk menunjang kegiatan para narapidana dan untuk meningkatkan kreativitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model George C. Edward III yang dianggap penulis relevan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dalam model ini ada empat faktor penentu yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Strukur birokrasi. Bila digambarkan, kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

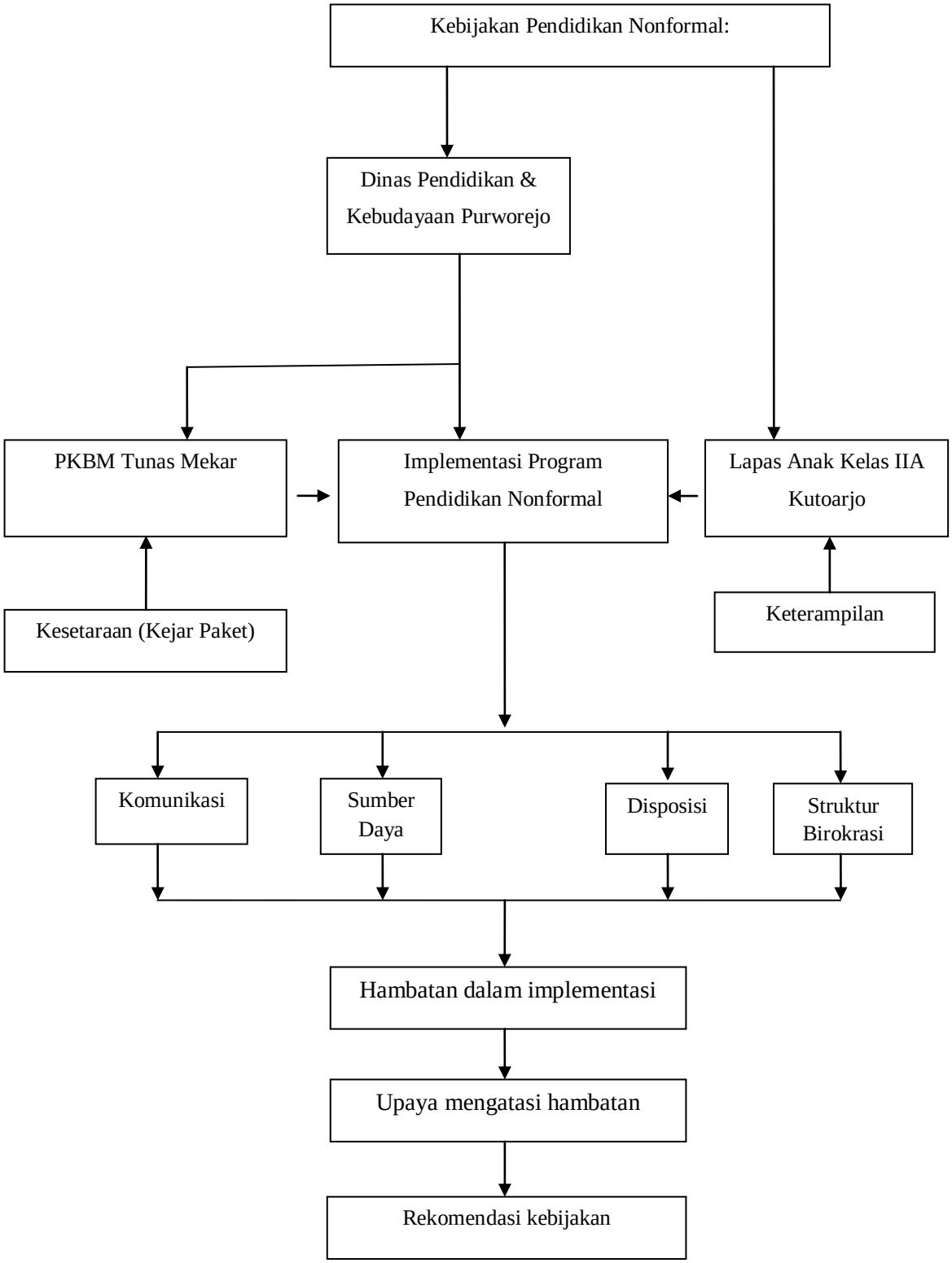

Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: penulis

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Implementasi program Pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas IIA Kutoarjo?, secara rinci diuraikan sebagai berikut:
   a. Bagaimana komunikasi untuk melaksanakan program pendidikan nonformal di lapangan?
   b. Dari mana sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan nonforma?
   c. Bagaimana disposisi implementor dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di lapangan?
   d. Bagaimana pengaruh struktur birokrasi dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di lapangan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi program pendidikan nonformal di Lapas Anak Kelas IIA Kutoarjo?
3. Apa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?